

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. pelaksanaan atau implentasi program nasional pemberdayaan masyarakat
Dalam pemberian pinjaman tanpa agunan yaitu pada bidang kelompok simpan pinjam perempuan ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan yaitu kelompok SPP tersebut harus membentuk kelompok dan saling mengenal dan berjalan satu tahun dan mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana dan simpanan yang telah disepakati dan mempunyai organisasi kelompok dan administrasi sederhana.
2. pengelolaan dana bergulir kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) memang kadang dijumpai adanya tunggakan. Hal ini disebabkan adanya kelemahan pinjaman lewat program pemerintah tanpa menggunakan jaminan / agunan membutuhkan pendampingan yang optimal, apalagi sarannya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang sebagian besar mempunyai tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah sehingga mudah terpengaruh oleh issue / informasi yang tidak benar, sebagai contoh banyak masyarakat yang terpengaruh oleh issue negative sehingga mereka berprinsip bahwa pinjaman lewat PNPM adalah dana hibah oleh pemerintah dan tidak perlu mengembalikan. Permasalahan tunggakan merupakan permasalahan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan tidak sedikit waktu, biaya dan

kebijakan. Sehingga perlu dukungan segenap pelaku UPK PNPM MPd baik dari level desa sampai kabupaten untuk tidak bosan-bosannya memberikan pemahaman atau pelatihan kepada masyarakat sehingga kelemahan-kelemahan bisa ditutupi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan skripsi tersebut, yang dijadikan sebagai saran adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang ada di Desa Bungarya, semestinya pelaku PNPM-MPd baik di tingkat Desa maupun Kecamatan, Serta masyarakat penerima mamfaat harus lebih konsisten pada ketentuan yang mengaturnya sesuai dengan prosedur dan pedoman umum PNPM-Mandiri, sehingga dapat mewujudkan Desa Bungaraya yang sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing.
2. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) harus ditingkatkan sosialisasinya serta menyadarkan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam program agar angka wanprestasi dalam perjanjian tidak besar karena kurang nya sosialisasi.